



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Desa menjadikan definisi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diarahkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang hakiki yakni memberikan pelayanan masyarakat guna mewujudkan rasa keadilan, melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa senantiasa dilandasi prinsip kemitrasejajaran hubungan antara Perbekel dan BPD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintahan kepada Bupati, BPD dan masyarakat, Pemerintah desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan kepada BPD dan menyusun Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 35 th. 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa.



B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah ditegaskan dalam Asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu asas akuntabel. Hakikat dari Pelaporan ini adalah agar Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek yaitu Hukum, Administrasi maupun secara Moral. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa adalah merupakan kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pelaporan ini sebagai salah satu wujud pengendalian pemerintah Desa untuk :

1. Mengetahui Kemajuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang direncanakan Pemerintahan Desa
2. Mengevaluasi berbagai Aspek seperti hambatan, permasalahan yang dihadapi, Upaya penanganan solusinya, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan dan sebagainya terkait pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Desa
3. Serta sebagai bahan evaluasi Bupati dalam menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan terhadap catatan kinerja Kepala Desa maupun program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan

C. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Visi Pemerintah Desa Bengkala 2020 - 2025 adalah:

“Mewujudkan Desa Bengkala yang Prima dalam Pelayanan Mengembangkan Potensi SDM, Berdaya Saing dalam Era Milenial berdasar Tri Hita Karana”

2. MISI

Misi merupakan pernyataan yang menjadi dasar penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga pernyataan misi akan membawa



desa kepada suatu fokus yang menjelaskan keberadaan desa yang bersangkutan. Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumber daya desa sehingga pernyataan Visi dan Misi tersebut harus selaras dengan amanah yang diembannya.

Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai dengan baik. Misi diharapkan juga akan dapat menunjukkan peran dan program-program Pemerintah Desa kepada seluruh lapisan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Misi Pemerintah Desa Bengkala adalah :

a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan masyarakat di Desa Bengkala dengan Bekerja nyata untuk masyarakat dan pelayanan prima tanpa membedakan dengan Pola Kerja cerdas tuntas dan ikhlas;
2. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan pemerintahan Desa;
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Desa yang transparan akuntabel dan profesional dengan kerja nyata;

b. Mengembangkan Potensi Desa Bengkala dibidang Ekonomi dan Produk unggulan Desa

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan untu mencapai misi ini antara lain:

1. Meningkatkan Produk unggulan Desa di bidang pertanian;
2. Mengembangkan Potensi Desa di bidang Pariwisata;
3. Menciptakan pusat pertumbuhan perekonomian baru di Desa;
4. Meningkatkan BUMDesa;

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Khususnya Generasi Muda

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan untu mencapai misi ini antara lain:

1. Memberdayakan generasi muda yang putus sekolah melalui program Pelatihan kerja Bagi para pencari kerja;



2. Mengupayakan program beasiswa bagi warga masyarakat yang kurang mampu;
3. Meningkatkan sarana prasarana dalam memantapkan SDM generasi muda
4. Meningkatkan sarana prasarana olahraga;

d. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Desa Bengkala

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Memantapkan kelembagaan di Desa dalam meningkatkan pembangunan yang merata dan berkeadilan melalui kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
2. Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur dasar dan infrastruktur yang menunjang perekonomian dan aktifitas kelembagaan masyarakat di Bengkala;
3. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan Masyarakat;

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya merupakan upaya ataupun cara dalam mengoptimalkan potensi ataupun mengatasi permasalahan. Sehubungan dengan hal tersebut strategi pembangunan desa dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada di desa serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Desa Bengkala menetapkan strategi pembangunan dengan memfokuskan pada upaya-upaya pengelolaan dan penanganan masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kemakmuran rakyat serta upaya untuk menciptakan keadaan Desa Bengkala yang sejahtera, adil dan lestari.

Secara umum anggaran Desa Bengkala diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dan pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa Bengkala dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam semua bidang yang berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran diantaranya :



1. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebisa mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparasi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin anggaran

Dalam hal ini pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan kemudian untuk belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran

4. Keadilan Anggaran

Penguatan Desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar

5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

Dan dari hasil analisa oleh Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa, serta Masyarakat Desa Bengkala pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapat dari hasil pengkajian Desa dimulai dari menjangring Aspirasi Masyarakat mulai dari tingkat Dadia, Tempek dan Banjar Dinas sampai pada tingkat paling atas yaitu hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng serta Penjabaran Visi Misi Desa.

Dari hasil pengkajian Desa tersebut didapatkanlah masalah utama atau isu strategis dalam Pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan oleh Desa Bengkala secara umum adalah sebagai berikut :



1. Belum terpenuhinya Sarana Prasarana Desa seperti Inprastruktur Jalan, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, dan komunikasi,
2. Keberadaan Kelompok-kelompok yang ada belum ditata dengan baik dan belum menyadari arti dan makna berkelompok,
3. Masih rendahnya Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa,
4. Masih rendahnya Kapasitas Kelembagaan yang ada di Desa,
5. Terbatasnya Pembinaan Generasi Muda Desa,

Mengingat dinamika pengembangan wilayah Kabupaten Buleleng saat ini lebih mengarah pada perkembangan sektor pertanian dan Industri, maka arah kebijakan pembangunan Desa Bengkala menitikberatkan pada pengembangan sektor Pertanian. Disamping sektor –sektor tersebut Desa Bengkala juga mengembangkan arah kebijakannya pada sektor pendidikan dan sektor pariwisata. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka penataan sistem pemerintahan diperbaiki secara bertahap.

Untuk mewujudkan arah kebijakan diatas perlu strategi-strategi yaitu :

1. Merubah cara pandang dan pemahaman serta menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya membentuk kelompok Tani dan kelompok Nelayan serta memfasilitasi pembentukan gabungan kelompok Gapoktan di tingkat desa dan juga menambah wawasan para petani tentang pentingnya merubah sistem dari petani non organik kepada petani organik.
2. Menjalni kerjasama dengan pihak ketiga untuk mewujudkan point pertama.
3. Menambah wawasan masyarakat tentang pengembangan sektor pariwisata, untuk pengembangan pariwisata berbasis pertanian (agrowisata)
4. Bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait industri wisata serta membentuk kelembagaan desa wisata dan membuat peraturan tentang desa wisata untuk menunjang perwujudan point ketiga.



BAB II

PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAANNYA

A. RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/atribut, listrik/telpon,dll)
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD (ATK, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpn,dll)
 - g. Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan
 - b. Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa
3. Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Pelayanan administrasi umum dan Kependudukan (Surat pengantar/Pelayanan KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga)
 - b. Penyusunan / Pendataan / Pemuktahiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)
 - c. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Desa
4. Bidang Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes) bersifat regular
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug warga yang bersifat non regular sesuai kebutuhan desa)



-
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes / RKPDes, dll)
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes / APBDes Perubahan / LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
 - e. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)

Pelaksanaan dari Rencana Program Penyelenggaraan Pemerintah Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/atribut, listrik/telpon,dll)
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD (ATK, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon,dll)
 - g. Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan
 - b. Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa
3. Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Pelayanan administrasi umum dan Kependudukan (Surat pengantar/Pelayanan KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga)
 - b. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Desa
4. Bidang Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes) bersifat regular
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes / RKPDes, dll)
 - c. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)



B. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA/TPQ/ Madrasah Non - Formal Milik Desa (Bantuan Honor pengajar, pakaian seragam, operasional)
 - b. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2. Bidang Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) /Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin)
 - b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahanm, Kelas ibu hamil, Kelas lansia, Insentif Kader Posyandu)
 - c. Penyuluhan dan pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan)
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa/(Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan)
4. Bidang Kawasan Pemukiman
 - a. Pemeliharaan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa
 - b. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Pemukiman (Penampungan Bak Sampah)

Pelaksanaan dari Rencana Program Pembangunan Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan



-
- a. Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA/TPQ/ Madrasah Non - Formal Milik Desa (Bantuan Honor pengajar, pakaian seragam, operasional)
 - b. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2. Bidang Kesehatan
- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) /Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin)
 - b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahanm, Kelas ibu hamil, Kelas lansia, Insentif Kader Posyandu)
 - c. Penyuluhan dan pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan)
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa/(Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan)
4. Bidang Kawasan Pemukiman
- a. Pemeliharaan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa
 - b. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Pemukiman (Penampungan Bak Sampah)

C. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
 - b. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (Dengan Masyarakat/Instansi Pemerintah Daerah,dll)



Skala Lokal Desa

2. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa ditingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 - c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) Tingkat Desa
3. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 - b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
 - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
4. Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan Lembaga Adat
 - b. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - c. Pembinaan PKK

Pelaksanaan dari Rencana Program Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
2. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) Tingkat Desa
3. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
4. Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan Lembaga Adat
 - b. Pembinaan PKK



D. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
 - b. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
2. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD
3. Bidang Pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan keluarga
 - a. Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
 - b. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
4. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - a. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

Pelaksanaan dari Rencana Program Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
 - b. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
2. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
3. Bidang Pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan keluarga
 - a. Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
4. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal



- a. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

E. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK DESA

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - a. Penanggulangan Bencana
2. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - a. Sub Bidang Keadaan Mendesak

Pelaksanaan dari Rencana Program Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - a. Sub Bidang Keadaan Mendesak



BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Bengkala Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian terlampir

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	1.493.669.700,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	15.146.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	<u>1.508.815.700,00</u>
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp.	1.616.525.044,05
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	15.552.246,60
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	<u>1.632.077.290,65</u>
Surplus /(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(15.552.246,60)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	122.855.344,05
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	406.246,60
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	<u>123.261.590,65</u>
3.1 Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp.	0,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp.	0,00



B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Peraturan Desa Bengkala Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022.

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	KURANG/LEBIH	SUMBER DANA	
1		2	3		4	5	6	7	
a	b	C	a	b					
			4		PENDAPATAN	1.508.815.700,00	1.461.548.011,17	47.267.688,83	
			4	1	Pendapatan Asli Desa	16.536.000,00	16.536.000,00	0,00	
			4	2	Transfer	1.487.029.700,00	1.437.500.300,00	45.529.400,00	
					Dana Desa	758.967.000,00	758.967.000,00	0,00	
					Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	139.538.100,00	90.008.700,00	45.529.400,00	
					Alokasi Dana Desa	530.524.600,00	530.524.600,00	0,00	
					Bantuan Keuangan Provinsi	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
					Bantuan Keuangan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	
			4	3	Pendapatan Lain-lain	5.250.000,00	7.511.711,17	2.261.711,17	<i>Bunga Bank</i>
					JUMLAH PENDAPATAN	1.508.815.700,00	1.461.548.011,17	47.267.688,83	
			5		BELANJA	1.632.077.290,65	1.439.193.482,00	192.883.808,65	
1					PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	689.621.914,02	633.233.808,00	56.388.106,02	
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	569.039.914,02	564.177.803,00	4.862.111,02	
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>01</i>			<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>64.620.000,00</i>	<i>64.620.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>ADD</i>
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>01</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>64.620.000,00</i>	<i>64.620.000,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>02</i>			<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>344.176.000,00</i>	<i>344.176.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>ADD</i>
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>02</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>344.176.000,00</i>	<i>344.176.000,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>03</i>			<i>Penyediaan Jaminan Sosial Perbekel dan Perangkat Desa</i>	<i>12.714.936,00</i>	<i>12.714.936,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>03</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>12.714.936,00</i>	<i>12.714.936,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>04</i>			<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)</i>	<i>86.925.978,02</i>	<i>82.314.749,00</i>	<i>4.611.229,02</i>	<i>ADD/PAD/SILPA ADD</i>



1	1	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	86.925.978,02	82.314.749,00	4.611.229,02	
1	1	05			Penyediaan Tunjangan BPD	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	ADD
1	1	05	5	1	Belanja Pegawai	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	
1	1	06			Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)	2.103.000,00	2.038.000,00	65.000,00	ADD
1	1	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.479.000,00	1.003.000,00	476.000,00	
1	1	91			Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	BKK Prov
1	1	91	5	1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	BKK Prov
1	2				Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	59.872.000,00	45.794.005,00	14.077.995,00	
1	2	01			Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	40.534.30000	38.638.505,00	1.895.795,00	BHPD
1	2	01	5	3	Belanja Modal	40.534.30000	38.638.505,00	1.895.795,00	
1	2	02			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	19.337.700,00	7.155.500,00	12.182.200,00	BHPD
1	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	19.337.700,00	7.155.500,00	12.182.200,00	
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	37.935.000,00	12.500.000,00	25.435.000,00	
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	23.945.000,00	3.500.000,00	20.445.000,00	BHRD
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	23.945.000,00	3.500.000,00	20.445.000,00	
1	3	02			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	3.887.000,00	0,00	3.887.000,00	BHPD/ DDS
1	3	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.887.000,00	0,00	3.887.000,00	
1	3	03			Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	10.103.000,00	9.000.000,00	1.103.000,00	
1	3	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.103.000,00	9.000.000,00	1.103.000,00	
1	4				Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.775.000,00	10.762.000,00	12.013.000,00	
1	4	01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	9.005.000,00	3.690.000,00	5.315.000,00	BHRD
1	4	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	9.005.000,00	3.690.000,00	5.315.000,00	
1	4	02			Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (mudus,rembug warga, dll yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	2.666.000,00	0,00	2.666.000,00	BHPD
1	4	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.666.000,00	0,00	2.666.000,00	



1	4	03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes, dll)	7.499.000,00	6.572.000,00	927.000,00	BHPD
1	4	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	7.499.000,00	6.572.000,00	927.000,00	
1	4	04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	BHRD
1	4	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	
1	4	06			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	500.000,00	500.000,00	0,00	PAD
1	4	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	
1	4	07			Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	0,00	0,00	0,00	BHPD
1	4	07	5	2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
2					PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	319.250.073,11	254.274.750,00	82.351.673,11	
2	1				Pendidikan	56.011.000,00	55.955.000,00	56.000,00	
2	1	01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	DDS
2	1	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	
2	1	08			Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	7.411.000,00	7.355.000,00	56.000,00	DDS
2	1	08	5	2	Belanja Barang dan Jasa	7.411.000,00	7.355.000,00	56.000,00	
2	2				Kesehatan	118.139.650,00	69.261.000,00	48.878.650,11	
2	2	01			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	11.493.500,00	9.963.000,00	1.530.500,00	DDS
2	2	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	11.493.500,00	9.963.000,00	1.530.500,00	
2	2	02			Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	61.002.000,00	45.708.000,00	15.294.000,00	DDS
2	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	61.002.000,00	45.708.000,00	15.294.000,00	
2	2	03			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	6.230.000,00	2.075.000,00	4.155.000,00	DDS
2	2	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	6.230.000,00	2.075.000,00	4.155.000,00	
2	2	04			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	33.982.900,00	7.095.000,00	26.887.900,00	DDS
2	2	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	33.982.900,00	7.095.000,00	26.887.900,00	



2	2	09			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	5.431.250,00	4.420.000,00	1.011.250,00	DDS
2	2	09	5	3	Belanja Modal	5.431.250,00	4.420.000,00	1.011.250,00	
2	3				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.099.423,11	120.058.750,00	16.040.673,11	
2	3	11			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang	108.163.750,00	100.242.750,00	7.921.000,00	DDS
2	3	11	5	3	Belanja Modal	108.163.750,00	100.242.750,00	7.921.000,00	
2	3	14			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa/ (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan)	27.935.673,11	19.816.000,00	8.119.673,11	DDS
2	3	14	5	3	Belanja Modal	27.935.673,11	19.816.000,00	8.119.673,11	
2	4				Sub Bidang Kawasan Pemukiman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2	4	09			Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	DDS
2	4	09	5	2	Belanja Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2	4	15			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (Penampungan,Bank Sampah dll)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	DDS
2	4	15	5	2	Belanja Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
3					PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	86.938.803,52	63.188.721,00	23.750.082,52	
3	1				Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	3.785.000,00	1.085.000,00	2.700.000,00	
3	1	01			Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli dll)	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	DDS
3	1	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	
3	1	03			Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	2.700.000,00	0,00	0,00	BHRD
3	1	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	0,00	0,00	
3	2				Kebudayaan dan Keagamaan	16.666.995,73	9.944.000,00	6.722.995,73	
3	2	01			Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	BHPD
3	2	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
3	2	02			Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	BHPD
3	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	
3	2	03			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	12.316.995,73	9.944.000,00	2.372.995,73	BHPD+ PAD+Si lpa PBH



3	2	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	12.316.995,73	9.944.000,00	2.372.995,73	
3	3				Kepemudaan dan Olah Raga	9.050.000,00	5.000.000,00	4.050.000,00	
3	3	01			<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>BHPD</i>
3	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	
3	3	02			<i>Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>BHPD</i>
3	3	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
3	3	04			<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>BHPD</i>
3	3	04	5	3	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3	4				Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	54.436.807,79	47.159.721,00	10.277.086,79	
3	4	01			<i>Pembinaan Lembaga Adat</i>	<i>42.639.713,00</i>	<i>41.009.721,00</i>	<i>1.629.992,00</i>	<i>BKK PROV</i>
3	4	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	42.639.713,00	41.009.721,00	1.629.992,00	
3	4	02			<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	<i>5.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400.000,00</i>	<i>BHPD+ DLL</i>
3	4	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	
3	4	03			<i>Pembinaan PKK</i>	<i>9.397.094,79</i>	<i>6.150.000,00</i>	<i>3.247.094,79</i>	<i>BHPD+ SILPA DLL</i>
3	4	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	9.397.094,79	6.150.000,00	3.247.094,79	
4					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	228.266.500,00	182.496.203,00	45.770.297,00	
4	2				Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	193.668.850,00	170.918.850,00	22.750.000,00	
4	2	01			<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)</i>	<i>41.668.850,00</i>	<i>18.918.850,00</i>	<i>22.750.000,00</i>	<i>DD</i>
4	2	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	41.668.850,00	18.918.850,00	22.750.000,00	
4	2	02			<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)</i>	<i>152.000.000,00</i>	<i>152.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>DDS</i>
4	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	
4	3				Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.748.900,00	6.689.404,00	7.059.496,00	
4	3	01			<i>Peningkatan kapasitas kepala Desa</i>	<i>8.248.900,00</i>	<i>6.689.404,00</i>	<i>1.559.496,00</i>	<i>BHPD</i>
4	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	8.248.900,00	6.689.404,00	1.559.496,00	
4	3	02			<i>Peningkatan kapasitas perangkat Desa</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>BHPD</i>
4	3	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
4	3	03			<i>Peningkatan kapasitas BPD</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>BHPD</i>
4	3	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	



4	4				Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga	19.848.750,00	4.087.949,00	15.760.801,00	
4	4	02			Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan anak	6.380.000,00	4.087.949,00	2.292.051,00	DDS
4	4	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	6.380.000,00	4.087.949,00	2.292.051,00	
4	4	03			Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel	13.468.750,00	0,00	13.468.750,00	DDS
4	4	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	13.468.750,00	0,00	13.468.750,00	
5					PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	308.000.000,00	306.000.000,00	2.000.000,00	
5	1				Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
5	1	00			Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
5	1	00	5	4	Belanja Tak Terduga	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	DDS
5	1	00	5	4	Belanja Tak Terduga	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
5	3				Mendesak	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	
5	3	00			Penanggulangan Bencana	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	
5	3	00	5	4	Belanja Tak Terduga	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	
					JUMLAH BELANJA	1.632.077.290,65	1.439.193.482,00	192.883.808,65	
					SURPLUS / (DEFISIT)	(123.261.590,65)	22.354.529,17	(145.616.119,82)	
								0,00	
			6		PEMBIAYAAN	123.261.590,65	123.261.590,65	0,00	
			6	1	Penerimaan Pembiayaan	123.261.590,65	123.261.590,65	0,00	
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-		
					SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	145.616.119,82	(145.616.119,82)	

C. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Pendapatan Desa

Rp. 1.461.548.011,00



a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	16.536.000,00
b. Pendapatan Transfer		
- Dana Desa	Rp.	758.967.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	90.008.700,00
- Alokasi Dana Desa	Rp.	530.524.600,00
- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	58.000.000,00
c. Pendapatan Lain-lain		
- Bunga Bank	Rp.	4.500.000,00
- Lain-lain Pendapatan Desa yg Sah	Rp.	712.500,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.439.193.482,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	633.233.808,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	254.274.750,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	63.188.721,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	182.496.203,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	306.000.000,00
Jumlah Belanja		<u>Rp.1.439.193.482,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	22.354.529,17
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	123.261.590,65
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
c. Silpa Tahun 2022	Rp.	145.616.119,82

BAB IV
KEBERASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN
UPAYA YANG DITEMPUH



Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, diuraikan dalam tabel dibawah ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	UPAYA YANG DITEMPUH
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya kinerja perangkat desa sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">- Prasarana kantor yang sudah mulai mengalami kerusakan sehingga membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan dan gedung kantor yang mengalami beberapa kerusakan dan tampilan yang kurang baik.	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pemeliharaan dan perawatan prasarana kantor secara rutin dan melakukan perbaikan gedung yang mengalami kerusakan.
		<ul style="list-style-type: none">- Pemutahiran data Profil Desa dapat dilakukan dengan baik dan lengkap serta tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none">- Masih kurangnya data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan profil desa.	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan pendataan secara baik dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.
		<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan dokumen-dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dapat disusun dengan baik dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none">- Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan desa.- Masih mengalami kesulitan dalam pengumpulan data-data	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan sosialisasi dan melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan pembangunan desa.- Dilakukan monitoring dan evaluasi dalam proses pengumpulan data-data



			dalam proses penyusunan dokumen keuangan maupun laporan-laporan.	sebagai dasar dalam penyusunan dokumen-dokumen keuangan dan laporan-laporan.
NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	UPAYA YANG DITEMPUH
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	- Pemantauan dan penyuluhan terhadap kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.	- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan kesehatan lingkungan.	- Melakukan pemantauan dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan diri maupun lingkungan.
		- Kegiatan Posyandu berjalan dengan baik dan kasus balita stunting maupun kekurangan gizi terus menurun dari tahun ke tahun.	- Masih ada beberapa ibu hamil dan ibu menyusui yang pemahamannya tentang kesehatan masih kurang yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya stunting dan kurang gizi bagi balita.	- Melakukan penyuluhan tentang kesehatan kepada ibu hamil maupun ibu menyusui, serta memberikan asupan berupa makanan tambahan bagi balita.
		- Peningkatan pengetahuan dan kemampuan Kader Kesehatan	- Masih kurangnya pemahaman dan kemampuan	- Memberikan penyuluhan serta pembinaan terhadap Kader



			kader dalam melaksanakan tugas-tugasnya	guna meningkatkan kualitas dan kemampuan para Kader.
		- Terselenggaranya Desa Siaga Kesehatan dengan berbagai kegiatan preventifnya.	- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai salah satu bentuk pencegahan demam berdarah.	- Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan kegiatan pogging.
		- Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/ Polindes.	- Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Poskesdes/ Polindes milik Desa.	- Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan guna dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	UPAYA YANG DITEMPUH
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	- Terlaksananya kegiatan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan.	- Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pelestarian seni, adat budaya dan keagamaan. Adanya kegiatan-kegiatan keagamaan	- Melaksanakan kegiatan-kegiatan seni, adat/kebudayaan dan keagamaan di tingkat desa. Melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak dapat dibiayai



			yang belum bisa dibiayai dari APBDesa.	dari APBDesa dengan swadaya.
		- Terlaksananya kegiatan pembinaan PKK berupa Pembinaan Administrasi.	- Masih perlu ditingkatkannya kemampuan dan keterampilan anggota PKK serta masih kurangnya sarana maupun prasarana pendukung kegiatan PKK.	- Pengadaan pakaian segaram untuk PKK, dan untuk kegiatan pembinaan yang belum dapat dilaksanakan di tahun ini akan difasilitasi di tahun berikutnya.
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat terutama terhadap pemenuhan kebutuhan pangan	- Menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama pangan sebagai dampak terjadinya inflasi.	- Melaksanakan beberapa program ketahanan pangan sebagai upaya mengatasi inflasi yang terjadi.

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	UPAYA YANG DITEMPUH
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	- Penanggulangan bencana dan keadaan mendesak dapat ditangani dengan baik sehingga	- Kejadian Alam yang sangat sulit untuk di prediksi - Keadaan	- Menjaga keharmonisan alam, menjaga kesehatan masyarakat - Memberikan bantuan



			ekonomi masyarakat yang semakin melemah	kepada masyarakat yang membutuhkan
		- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan tepat waktu.	- Pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat.	- Memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sesuai dengan ketentuan sehingga tepat sasaran dan pelaksanaannya tepat waktu.

BAB V
P E N U T U P

A. KESIMPULAN LAPORAN



Laporan dan pertanggung jawaban adalah bagian terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa, maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagaimana terurai dalam Laporan ini sebagai berikut:

1. Perbekel menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling Lambat 3 (tiga) Bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2022.
2. Tahapan Perencanaan Program dan Kegiatan disesuaikan dengan RKP Desa Bengkala.
3. Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Program Kegiatan Desa Bengkala Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
4. Terurainya tingkat Pencapaian keberhasilan, Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.
5. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bengkala yang meliputi penyelenggaraan urusan dan kewenangan yang telah ada dan dilaksanakan secara rutin dari tahun ke tahun, telah terlaksana dengan baik hal ini terjadi karena terjalinnya kerja sama yang baik dan harmonis antara pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta serta seluruh komponen masyarakat dalam kerangka good governace untuk mewujudkan Desa Bengkala yang prima dalam pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya Desa Bengkala yang maju, aman, damai dan sejahtera.

Dengan adanya perubahan-perubahan regulasi yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, telah memacu desa untuk terus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap aturan tersebut. Terkadang terasa sulit untuk diaplikasikan, namun dengan upaya dan kemauan untuk belajar perubahan tersebut dapat teratasi. Demikian pula dengan pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini, disadari masih banyak ketidaksempurnaan. Oleh karena itu masukan dan usul saran sangat kami harapkan demi tersusunnya Laporan ini menjadi lebih baik.

B. SARAN



1. Seiring dengan harapan dalam hal ini Menteri Desa dan Menteri Keuangan yang menginginkan Desa cermat dan cepat dalam Penyerapan Anggaran maka dengan ini kami tanpa mengurangi rasa hormat memberikan saran agar Pemerintah Kabupaten tidak lambat dalam Penetapan Pagu Anggaran sehingga Desa dapat dengan cepat menyelesaikan Perencanaan Kegiatan pada tahun berikutnya.
2. Pada Tahun Anggaran 2022 ini Program Perencanaan kami tidak terealisasi 100% karena adanya kurangnya koordinasi dengan Pelaksana Kegiatan dan adanya rencana pendapatan Desa yang tidak terealisasi yaitu yang bersumber dari BHPD dan BHRD.
3. Demi kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kami dari Pemerintah Desa sangat antusias sekali jika Pemerintah Kabupaten atau Dinas terkait selalu berupaya meningkatkan Kapasitas Aparat Desa khususnya tentang Pengelola Keuangan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2022 ini kami buat sebagai bahan evaluasi kinerja kami Pemerintah Desa Bulian sebagai laporan.

Bengkala, 10 Maret 2023
PERBEKEL BENGKALA



LAMPIRAN I

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK DESA BULIAN



-
1. BANJAR DINAS KAJANAN
- Jumlah KK : 385
- Jumlah Laki-laki : 599
- Jumlah Perempuan : 586
- Jumlah Keseluruhan : 901
2. BANJAR DINAS KELODAN
- Jumlah KK : 407
- Jumlah Laki-laki : 867
- Jumlah Perempuan : 867
- Jumlah Keseluruhan : 1734

LAMPIRAN II

**RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN 2022**

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	Peraturan Perundang-undangan	a.Peraturan Desa b.Peraturan bersama Perbekel c.Peraturan Perbekel d.Keputusan Perbekel	11 buah - 9 buah 39 buah
2	Kependudukan	a.Jumlah Penduduk 1)Laki-laki 2)Perempuan 3)Jumlah Kepala Keluarga 4)Jumlah Anggota Keluarga 5)Jumlah Jiwa b.Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan 1)Pendidikan Umum 2)Pendidikan Khusus	1.466 jiwa 1.734 jiwa 972 KK 2.909 jiwa 2.909 jiwa 2.910 Orang -



		c. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian 1) PNS 2) TNI 3) Swasta	40 orang 3 orang 262 orang
3	Pertanahan	a. Status Tanah 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai b. Luas Tanah 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa c. Peruntukan 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum d. Tanah Yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	645 bh - - - - - 2.0 KM - - 27.00 ha/m ² 1.8 ha/m ² - -
4	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS b. Jumlah Anggota BPD c. Musyawarah Desa d. Musrenbangdes e. Musyawarah BPD	- 13 orang 5 orang 5 kali 1 kali 5 kali
5	Ketentraman dan Ketertiban	a. Pembinaan Linmas 1) Jumlah Anggota	37 orang



		2)Alat Pemadam Kebakaran 3)Jumlah Linmas Terlatih b.Ketentraman dan Ketertiban 1)Jumlah Kejadian Kriminal 2)Jumlah Bencana Alam 3)Jumlah Operasi Penertiban 4)Jumlah Pos Keamanan 5)Jumlah Kecelakaan Remaja	1 Buah 37 orang - 5 - 5 pos 10
6	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	a.Jenis Lembaga Kemasyarakatan 1)Rt/Rw - Ada/Tidak 2)PKK - Ada/Tidak 3)Karang Taruna - Ada/Tidak 4)Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak 5)LPM - Ada/Tidak b.Lembaga Kemasyarakatan Membantu Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat - Ya/Tidak c.Lembaga Kemasyarakatan sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat dan sebagai Mitra Pemerintah Desa Ya/Tidak d.Lembaga Kemasyarakatan diikutsertakan dalam Pelaksanaan Program Sektor dan Program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak e.Lembaga Adat - Ada/Tidak F.Lembaga Adat dibentuk dengan Peraturan Desa terpisah dengan	Tidak Ada Tidak Ada Ada Ya Ya Ya Ada Ya



		Lembaga Kemasyarakatan - Ya/Tidak	
--	--	-----------------------------------	--

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya /Jumlah
1	Sarana dan Prasarana	a.Jalan Desa (Km) b.Jalan Kabupaten/Kota (Km) c.Jalan Provinsi (Km) d.Jalan Negara (Km) e.Jembatan (buah) f.Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	15,566 KM 4,750 KM 2,330 KM - 2 Buah Ada 1 Buah
2	Pembangunan Pendidikan	a.Tempat Pendidikan Umum 1)Kelompok Bermain (Jumlah) 2)Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3)Sekolah Dasar (Jumlah) 4)Sekolah Menengah (Jumlah) 5)Akademi (Jumlah) 6)Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) b.Tempat Pendidikan Khusus 1)Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2)Madrasah (Jumlah) 3)Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4)Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5)Kursus-kursus (Jumlah)	- 1 Unit 2 Unit - - - - - - - - -
3	Pembangunan Kesehatan	a.Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b.Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c.Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d.Rumah Sakit Mata (Jumlah) e.Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f.Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g.Rumah Bidan (Jumlah) h.Puskesmas (Jumlah)	- - - - - - - -



		i. Apotek (Jumlah)	-
4	Pembanguna Sosial Budaya dan Keagamaan	<p>a. Sarana Olah Raga</p> <p>1) Lapangan Umum (Jumlah)</p> <p>2) Lapangan Khusus (Jumlah)</p> <p>b. Sarana Kesenian/Kebudayaan</p> <p>1) Gelanggang Remaja (Jumlah)</p> <p>2) Gedung Kesenian (Jumlah)</p> <p>3) Gedung Teater (Jumlah)</p> <p>4) Gedung Bioskop (Jumlah)</p> <p>c. Sarana Sosial</p> <p>1) Panti Asuhan (Jumlah)</p> <p>2) Panti Pijat Tuna Netra (Jumlah)</p> <p>3) Panti Wordo (Jumlah)</p> <p>4) Panti Jompo (Jumlah)</p> <p>d. Sarana Komunikasi</p> <p>1) Radio Komunitas (Jumlah)</p> <p>2) Papan Pengumuman (Jumlah)</p>	<p>1 Unit</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>3 Buah</p>
5	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	<p>a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)</p> <p>b. Industri Besar (Jumlah)</p> <p>c. Industri Sedang (Jumlah)</p> <p>d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)</p> <p>e. Tempat Rekreasi (Jumlah)</p> <p>f. Hotel (Jumlah)</p> <p>g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)</p> <p>h. Saluran Irigasi (Jumlah)</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

c. Bidang Kemasyarakatan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya /Jumlah
1	Sosialisasi Produk	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah	



	Hukum Desa	tentang Desa 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berapa Kali) 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 3) Peraturan Menteri Mengenai Desa (Berapa Kali) b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa (Berapa Kali) 2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Desa (Berapa Kali) c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa Kali) 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa (Berapa Kali) 3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 Kali
2	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali) b. Masyarakat Menyampaikan Informasi Kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak) c. Masyarakat Memperoleh Informasi dan Pelayanan yang adil (Ya/Tidak) d. Masyarakat mendapat perlindungan dari gangguan Ketentraman dan Ketertiban (Ya/Tidak) e. Masyarakat Berpartisipasi dalam berbagai Kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	- Ada Ya Ya Ya
3	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi Mengenai Kerukunan Hidup Beragama (Berapa Kali)	1 kali



		b.Sosialisasi mengenai Pengembangan Olah Raga dan Kesenian (Berapa Kali)	1 kali
		c.Sosialisasi mengenai Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Berapa Kali)	1 kali
		d.Sosialisasi mengenai Lingkungan Hidup (Berapa Kali)	1 kali
		e.Sosialisasi mengenai Bahaya Narkoba dan Kriminal (Berapa Kali)	1 kali
		f.Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	1 kali
4	Sosial Keagamaan	a.Majelis Taklim (Jumlah) b.Majelis Gereja (Jumlah) c.Majelis Budha (Jumlah) d.Majelis Hindu (Jumlah) e.Remaja Masjid (Jumlah) f.Remaja Gereja (Jumlah) g.Remaja Budha (Jumlah) h.Remaja Hindu (Jumlah)	- - - - - - - Ada (320 orang)
5	Ketenagakerjaan	a.Penyalur Pembantu Rumah Tangga (Jumlah) b.Penampung Pekerja ke Luar Negeri (Jumlah)	- -

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya /Jumlah
1	Sosialisasi dan Motivasi Masyarakat	a.Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali) b.Bidang Ekonomi (Berapa Kali) c.Bidang Politik (Berapa Kali) d.Bidang Lingkungan Hidup (Berapa Kali)	1 kali - - 1 kali



2	Pemberdayaan Masyarakat	a.Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) b.Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) c.Pemberdayaan Olah Raga (Berapa Kali) d.Pemberdayaan Karang Taruna (Berapa Kali)	- - 1 kali -
3	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali) b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	1 kali 1 kali

Bengkala, 10 Maret 2023

PERBEKEL BENGKALA

PERBEKEL BENGKALA
KECAMATAN BUTAN
KABUPATEN BULELENG

DE ASTIKA